

TAJUK RENCANA

Melacak Pendetang di Perbatasan

SETELAH hampir setahun dan angka tidak kunjung menurun, penanganan kasus Covid-19 terus dibenahi. Upaya yang dilakukan sekarang adalah mengendalikan laju penularan penyakit di masyarakat. Di tengah pertanyaan efektivitas bagi pengembangan ekonomi, pemerintah melaksakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro – dan sudah diperpanjang dua kali – hingga 23 Februari mendatang.

Dikutip dari laman Setkab, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sebelumnya PPKM telah diterapkan di tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Yakni, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. PPKM berlaku di 73 kabupaten/kota yang terdapat di provinsi-provinsi tersebut. "Dari 7 provinsi terlihat masih ada peningkatan di 5 provinsi, dan yang mengalami penurunan provinsi Banten dan Yogyakarta," ujar Airlangga.

Selain dinyatakan mengalamai penurunan kasus, evaluasi PPKM di DIY pun menunjukkan jumlah pasien turun dan kesembuhan naik (KR, 13/2). Dan pembenahan yang dilakukan di DIY terasa fundamental: penerapan sistem zonasi di tingkat RT. Semua ini menurut Sekda DIY Baskara Aji supaya memudahkan pengawasan dan mobilitas warga. (KR, 9/2).

Namun bukanlah semudah membalikkan tangan dalam melakukan pengawasan dan mobilitas warga di DIY. Pelanggaran tetap masih ditemukan. Maka penerapan tes antigen untuk menjaring kasus kian gencar dilakukan. Dikuti pelacakan, isolasi dan perawatan yang baik. Semua dalam upaya mengendalikan penularan. Bahkan penerapan ketentuan wisatawan harus

berbekal surat keterangan sehat dan pelacakan pendatang yang memasuki DIY pun dilakukan di perbatasan.

Mungkin, melacak pendatang di perbatasan lewat surat keterangan negatif dari pemeriksaan antigen bagi yang hendak memasuki DIY – bahkan mendekati *long week end*, libur Imlak – cukup bagus dilakukan. Ini sesuai ketentuan SE No 7/2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid yang dikeluarkan Satgas Penanganan Covid-19. Mengingat SE mewajibkan pelaku perjalanan darat membawa surat keterangan hasil skrining kesehatan dengan pemeriksaan swab PCR, antigen maupun tes GeNose C-19. (KR, 11/2)

Namun efektivitasnya bisa dipertanyakan, jika hal tersebut hanya dilakukan di pintu masuk formal di perbatasan. Terlalu banyak jalan tembus, jalan simpang bahkan jalan tikus untuk memasuki DIY dari pelbagai arah. Jika kawasan-kawasan ini terbebaskan dari penjaga, kegiatan yang dilakukan akan *muspra*. Apalagi masih rendahnya kesadaran warga untuk melakukan tes antigen ketika hendak ke luar kota, dengan menggunakan kendaraan pribadi. Mengingat biaya tes antigen paling tidak Rp 250.000, tidaklah ringan.

Ada banyak pelajaran dari pengalaman hampir setahun pandemi. Koordinasi dan kerja sama semua pihak dalam menjaga agar virus korona tidak terus menyebar, adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Namun sangat tepat menyebut bila sikap individu menjadi kunci (KR, 14/2). Ironisnya, kekhawatiran dikucilkan, merasa sebagai aib, membuat masih ada banyak ketidakjujuran terkait Covid. Padahal ajakan dalam melawan Covid jelas: *mari jujur kepada kami atau pidana menanti*. □

PEMROV DIY dewasa ini sedang menggodog revisi Perda No 4/2012 tentang Disabilitas sebagai inisiatif pihak eksekutif. Perda tersebut sudah tidak relevan lagi mengingat, antara lain, landasan regulasinya masih mengacu UU 4/1997 tentang Penyandang Cacat. Waktu itu sesungguhnya sudah ada UU No 39/1999 tentang Hak Azasi Manusia [HAM], namun muatan perda ini rupanya masih mengacu undang-undang yang memuat definisi dan peristilahan yang mirip itu.

Undang-undang HAM yakni UU 39/1999, merupakan implementasi dari Ketetapan MPR XVII/1998 tentang HAM, yang memerintahkan kepada Presiden dan DPR untuk membuatnya. Sebagai bentuk penerimaan terhadap Deklarasi Universal HAM PBB, undang-undang itu menyerap juga berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM, termasuk Konvensi Internasional tentang Disabilitas.

Belajar kasus di Barat, khususnya Amerika (AS), bangkitnya kesetaraan disabilitas dimulai 1970-an, dan tidak berlangsung serta-merta serta butuh perjuangan keras (McDonald-Raymaker 2013). Secara umum itu berlangsung berbareng dengan terbitnya kesadaran baru kesamaan hak-hak poskolonial berdasar ras dan agama, yang dipicu oleh antara lain penolakan kepada perang (Vietnam). Orang seperti petinju legendaris Muhammad Ali itu pun ikut memberi arah penyadaran publik demikian dengan caranya sendiri. Itu terjadi karena orang seperti Ali menghayati bagaimana termarginalisasi sebagai orang kulit hitam yang memeluk agama minoritas (Islam) di AS – apalagi jika itu dialami oleh orang dengan disabilitas (ODD).

Pergeseran Paradigma
Di Indonesia, tiga kata terakhir definisi disabilitas dalam UU 39/1999 tentang HAM, yakni frasa 'berdasarkan kesamaan hak', sudah menampakkan semangat emansipatif selaku wargane-

Farid B Siswantoro

gara. Penting memulai revisi Perda itu dengan memeriksa definisi pokoknya. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara definisi tentang disabilitas – yang notabene merupakan pemahaman publik – dengan perilaku diskriminatif terhadap ODD yang dialami dalam kehidupan nyata sehari-hari (Widiansari 2019). Kenyataan itu niscaya kian berlarut jika regulasi dengan definisi yang mirip itu tidak segera direvisi.



pergub lagi untuk jaminan kesehatan, ditambah satu SK; dua SK tentang ban-sos dan satu SK tentang komite disabilitas.

Sayangnya, semua masih mengacu ke 'paradigma 1997' dengan perkecualian pada Pergub 60/2014, Pergub 61/2014, dan Pergub 64/2014. Padahal dalam konsideran Perda itu undang-undang HAM juga sudah disebut; namun paradigma lama masih kentara. Contohnya, bisa diperiksa dari definisi ODD di situ, yakni: "orang yang mengalami ... kelainan ... fungsi organ [fisik/mental]... dalam jangka waktu tertentu". Bandingkan dengan UU 8/2016 yang mendefinisikan ODD sebagai "orang yang mengalami keterbatasan... (sehingga memperoleh) hambatan untuk berpartisipasi (sebagai) warga negara berdasarkan kesamaan hak".

Mengingat perkembangan kebutuhan akal-budi makhluk Tuhan yang bermartabat, dalam perda mendatang setidaknya dua pasal baru mestinya diakomodasi, yakni: tentang layanan pemenuhan peribadatan dan seni-budaya bagi disabilitas. Selanjutnya, sesudah Pergub turunannya dibuat, Pemkab/Pemwali harus melakukan hal serupa secara beranting. Namun, yang jauh lebih penting nantinya adalah implementasi regulasi dalam kehidupan yang nirdiskriminasi. □

** Farid B Siswantoro, Ketua Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas (PPHD) DIY*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisji subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kecerdasan Adversitas untuk Cegah Bunuh Diri

OPINI Kedaulatan Rakyat edisi Senin Pon, 1 Februari 2021 memuat tulisan Saudara Faisal Ismail berjudul '(Tidak) Bunuh Diri'. Tulisan tersebut melansir jumlah kasus bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul. Tahun 2020 jumlahnya mencapai 30 : sebanyak 27 orang mengakhiri hidup dengan gantung diri dan 3 sisanya minum racun. Jumlah keseluruhan sama seperti tahun 2019.

Kasus bunuh diri merupakan reaksi atas lemahnya seseorang dalam menghadapi kesulitan hidup. Ilmu psikologi menjelaskannya dalam ranah kecerdasan adversitas (*adversity intelligence*). Kemalangan dan kesengsaraan yang dihadapi, baik karena problem ekonomi, kesehatan, maupun sosial, mengalihkan pertahanan akal sehat. Ketidakberdayaan itu diperparah pula oleh ringkihnya posisi budi, akhlak, serta iman seseorang. Leluhur Jawa sebenarnya sudah memberikan *pitutur* tentang *eling lan waspada* dalam menghadapi masalah hidup. Konsep *eling lan waspada* membuat individu tetap berada dalam frekuensi *nggayuh kawicaksaning Gusti*.

Tidak Terjebak
Kecerdasan adversitas dapat menjadi pertahanan individu agar seseorang tidak terjebak pada perbuatan bunuh diri. Kecerdasan ini merupakan harmoni antara dimensi intelektual, emosional, dan spiritual. Dalam wacana ilmu psikologi, tiga kecerdasan tersebut dinamai kecerdasan intelektual atau *intelligence quotient* (IQ), kecerdasan emosional atau *emotional quotient* (EQ), serta kecerdasan spiritual atau *spiritual quotient* (SQ).

Pertama, kecerdasan intelektual mengukur kemampuan intelektual, analisis, logika, dan rasio seseorang. Ia merupakan modal yang sangat baik untuk lulus dari semua jenis ujian, termasuk meraih nilai tinggi dalam uji kecerdasan. Kedua, kecerdasan emosional yang meliputi kesadaran, penerimaan, dan penghormatan terhadap diri sendiri.

Sutrisna Wibawa

Orang yang mempunyai kecerdasan ini mampu menguasai diri, memahami serta menerima lingkungan sekitar, mempercayai sesama, dan mempengaruhi orang. Ketiga, kecerdasan spiritual yang merupakan proses penyeberangan, pelampauan, penembusan makna dari wilayah material ke wilayah spiritual.

Poin terakhir di atas mampu mempertebal iman dan takwa seseorang, sehingga budi dan akhlak mulianya terbangun. Di samping ketiga kecerdasan yang telah dikenal secara umum, kecerdasan adversitas memberikan konteks, praksis, sekaligus solusi alternatif untuk menghadapi berbagai kesulitan. Sebab kecerdasan ini adalah daya sinergis antara budi, akhlak, dan iman manusia dalam menundukkan tantangan, menekuk berbagai kesulitan, serta memecahkan beragam masalah.

Sepakat
Semua orang dapat menerapkan kecerdasan adversitas. Tidak terkecuali kelompok masyarakat yang rentan bunuh diri. Kecerdasan ini efektif dilakukan ketika soliditas masyarakat diperkuat secara sistemis dan kultural. Karena itu, keguyuban di antara warga dalam satu RT, RW, dan pedukuhan seyogianya digalakkan. Budaya gotong-royong yang merupakan kearifan lokal masyarakat Gunungkidul menjadi basis utama penerapan kecerdasan adversitas.

Penulis bersepakat dengan usulan Saudara Faisal Ismail agar ada upaya koordinatif, sinergis, serta serius dalam bentuk edukasi sosial, bimbingan moral, dan pencerahan keagamaan. Dengan catatan komunikasi interpersonal yang di-

lakukan mengintegrasikan unsur IQ, EQ, SQ, dan AQ. Tentu bukan ceramah, melainkan berbasis praktik secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah semestinya mengejawantahkan *lelaku adiluhung memayu hayuning brayan agung*.

Pemerintah desa dan tokoh masyarakat harus menjadi teladan. Sebagai contoh, tegur sapa di antara warga dengan saling mengunjungi dan saling membantu jika sedang dalam kesulitan (unsur EQ), menggiatkan ibadah secara berjamah (SQ), serta selalu mengedepankan musyawarah dengan melibatkan seluruh warga dalam perencanaan pembangunan desa dan mencari solusi bersama jika ada permasalahan yang dihadapi masyarakat (IQ) dan (AQ). Dengan demikian, deteksi dini menjadi penting dilakukan melalui langkah arus bawah. Selain merekatkan kohesi sosial ia mampu memperkuat psikologi warga. □

** Prof Dr Sutrisna Wibawa MPd, mantan Rektor UNY, kini dosen Pascasarjana Universitas Sarjanawijaya Tanamiswa*

Pojok KR

Terkurung di Keputren, Gusti Moeng dan Gusti Rumbay 'ngramban'
-- **Semoga sayuran menjadikan lebih sehat** ***

Belum semua RT bentuk Satgas Covid
-- **Tantangan bagi semua** ***

Pembunuhan di Rembang diduga bermotif uang Rp 15 juta
-- **Yang pasti, 4 nyawa telah melayang**

Berabs

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Belajar Daring dengan Video

PENGETATAN secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) untuk memutus mata rantai Covid-19 dan variannya, membuat pembelajaran kembali dalam jaringan.

Sisi positif dampak pandemi ini adalah kreativitas yang dibuat guru dan direpsions orang tua dan siswa. Dalam pembelajaran mau tidak mau penggunaan aplikasi gadget suatu keharusan.

Guru bisa juga membuat video pembelajaran sesuai kompetensi dasar (KD) yang akan dicapai sesuai tujuan pembelajaran. Sekarang setiap orang rata-rata sudah punya gadget, dilengkapi alat perekam, suara, mikrofon, dan kamera.

Membuat video sederhana seperti mengajari di kelas, atau dipercontikkan dengan aplikasi editing video. Jika ukuran besar maka hasilnya bisa diupload di YouTube channel pribadi maupun lembaga. Link dari YouTube bisa dibagikan kepada siswa. Setelah video diupload maka siswa bisa melihat tayangan video, diberikan pada saat pembelajaran daring.

Langkah berikutnya dari hasil tayangan video, siswa mengerjakan latihan soal-soal terkait konten video yang ditonton siswa. Gaya visual ini akan memberikan dampak kesan lebih lama. Kemudian hasil pekerjaan siswa dianalisis dan feedback diberikan kepada siswa, apakah hasil pekerjaan sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) atau belum. Itulah proses belajar sampai tuntas (mastery learning).

Guru sebaiknya dalam durasi pembelajaran stanby untuk merespons pertanyaan siswa yang tidak paham dan diharapkan adanya diskusi melalui media online seperti WA grup, telegram atau langsung menanggapi komen video.

Pembelajaran daring diharapkan bisa menumbuhkan sikap kritis anak melalui tanya jawab di media sosial.

Manfaat dalam membuat video yakni pertama, dimanfaatkan siswa yang didampingi orang tua untuk belajar sesuai dengan kompetensi dasar, tingkat pemahaman bisa dicek dengan latihan soal.

Kedua, video yang sudah diupload di YouTube dimintakan komentar siswa, orang tua, kawan, untuk perbaikan, like, subscribe, dan menyebarkan.

Ketiga, guru juga bisa memakai untuk angka kredit kenaikan pangkat.

Keempat, bisa digunakan untuk penelitian tindakan kelas meskipun online melalui video bisa meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan penerapan, bisa diuji dengan angket google form, kemudian dianalisis peningkatannya. Hasil penelitian yang dipresentasikan dan dibuat jurnal bisa menunjang pengembangan profesi guru pada unsur utama yakni publikasi ilmiah.

Kelima, hasil analisis dan rekomendasi penggunaan video pada proses pembelajaran dapat pula dijadikan langkah-langkah sekolah untuk mengambil kebijakan sebagai pengembangan video dari sederhana dikembangkan untuk dikelola secara profesional agar video lebih indah, menarik dan dinamis, sehingga siswa dan orang tua yang mendampingi daring semakin semangat untuk menonton, apalagi like, comment dan subscriber.

Membuat video sederhana dengan konten pembelajaran akan bermanfaat. Tapi yang lebih penting fokus untuk pembelajaran para murid agar cerdas, terampil dan berbudi pekerti luhur. □

** Eko Mulyadi, Guru Fisika dan Wakasek Humas SMKN 3 Yogya.*

Kedaulatan Rakyat

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSC. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussenahda. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabdandi, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Aftiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandarkr@yahoo.com, iklandarkr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu' Rp 90.000,00, Iklan Umum/Disayok... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluar... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945. **Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Perceatikan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rekening: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Samarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.